

I. PENDAHULUAN

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Sebagian besar intervensi medik menggunakan obat, oleh karena itu obat harus tersedia pada saat diperlukan dalam jenis dan jumlah yang cukup, berkhasiat nyata dan berkualitas baik (Fatokun, 2011; Hassali, 2012). Biaya obat juga merupakan biaya terbesar yaitu sekitar 60-70% dari total biaya pengobatan. Dalam rangka memberikan alternatif obat untuk masyarakat dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau serta ketersediaan obat yang cukup, maka pemerintah sejak tahun 1989 mengeluarkan program obat murah yang disebut dengan obat generik berlogo (OGB).

Dalam perkembangannya, ternyata penggunaan OGB masih sangat rendah. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian OGB di Indonesia pada tahun 2001 penggunaannya hanya sekitar 12%, dan di tahun 2007 menurun menjadi 7,8% meskipun pasar obat nasional naik (ISFI, 2009). Hal ini bertolak belakang dengan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana penggunaan obat generik pada tahun 1993 misalnya justru meningkat sekitar 63% (Ferraz, *et al*, 2007). Ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang OGB yang dilakukan oleh pemerintah tidak berhasil. Padahal dengan kondisi perekonomian sekarang ini, mestinya masyarakat menjadi sangat terbantu ketika mengakses obat murah yang bermutu baik seperti OGB ini. Dengan menggunakan OGB, justru akan terjadi penghematan terhadap biaya kesehatan yang sangat besar.

Data Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi (18 th keatas) adalah 31,7%. Apabila 7,2% penderita terdeteksi oleh tenaga kesehatan dan 25% diantaranya diterapi menggunakan obat generik (Kaptopril), maka secara nasional memberikan potensi penghematan sebesar, Rp 4,2 triliun/tahun dibandingkan menggunakan obat originator atau *branded generic* (Obat Generik Bermerek/OGM) (ISFI, 2009).

Rendahnya penggunaan OGB ini berhubungan erat dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OGB itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat termasuk tenaga kesehatan sendiri tentang OGB. Pengetahuan tersebut menyangkut kepada mutu OGB, disamping juga faktor gencarnya promosi OGM baik secara langsung ke dokter maupun melalui media cetak dan elektronik (ISFI, 2002). Hasil studi yang telah dilakukan tentang pengetahuan tenaga kesehatan di Kota Pariaman tentang obat generik, memberikan hasil bahwa secara umum tingkat pemahaman tenaga kesehatan di Puskesmas dalam wilayah Kota Pariaman tentang obat adalah termasuk kategori kurang. Jika tenaga kesehatan saja memiliki pengetahuan yang rendah tentang obat generik, apalagi masyarakat awam tentunya (Syofyan, 2011).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa informasi mutu OGB belum tersosialisasi dengan baik dan tepat. Padahal, pada hakekatnya, setiap OGB yang beredar di tengah masyarakat telah diuji mutunya oleh BPOM berupa uji Bioavailibilitas Bioekivalen (BABE) sehingga jika telah memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan akan mendapat izin edar dari BPOM. Selain itu produksi OGB seperti halnya OGM, dilakukan oleh industri farmasi yang telah mempunyai

sertifikat CPOB sehingga mutunya dapat dijamin dan kemudian dalam peredarannya senantiasa diawasi secara ketat oleh Badan POM.

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sekarang ini, dilihat dari segi pemenuhan akan harga kebutuhan barang termasuk obat menjadi sangat mahal, maka program revitalisasi penggunaan OGB perlu didukung oleh berbagai pihak yang berkompeten. Upaya pemetaan masalah OGB perlu dilakukan secepatnya, yang meliputi sikap dan pengetahuan masyarakat tentang OGB sehingga diperoleh data secara komprehensif terkait masalah OGB itu sendiri mengingat data seperti itu sampai saat ini belum ada terutama untuk Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal itulah, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang masalah OGB ini di Propinsi Sumatera Barat agar kita bisa mengetahui pengetahuan masyarakat Sumatera Barat secara komprehensif tentang OGB, dan sikap masyarakat Sumatera Barat terhadap penggunaan OGB. Hal ini juga menunjang program revitalisasi penggunaan OGB yang telah dicanangkan oleh pemerintah. , agar diperoleh target berupa inovasi metode sosialisasi OGB yang tepat yang berbasis kepada Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mutu OGB.